



News Title : Cegah Potensi Kerugian di Masyarakat, Bappebtি Blokir 1.327 Domain Situs Web Entitas Ilegal

Media Name : tempo.co

Journalist : -

Publish Date : 15 August 2023

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 2,250,000

Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebtি), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebtি)

Ads Value : 750,000

Section/Rubrication : Nasional

Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Cegah Potensi Kerugian di Masyarakat, Bappebtি Blokir 1.327 Domain Situs Web Entitas Ilegal

Selasa, 15 Agustus 2023 21:18 WIB

Google News



INPU NASIONAL - kementerian perdagangan merau baaan Pengawas Perdagangan Berjanga Komoditi (Bappebtি) memblokir 1.327 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjanga Komoditi (PBK) pada Januari-Agustus 2023. Pemblokiran dilakukan Bappebtি dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebtি dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK.

"Bappebtি terus melaksanakan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," tegas Kepala Bappebtি Didid Noordiatmoko di Jakarta pada hari ini, Senin, 14 Agustus 2023.

Baca juga:
Ground Breaking Pasar Banjaran, Bupati: Ini Bukan Swastaniasi

menurut sumber informasi proritasi, ikut dan penawaran atau tawaran "D" ilegal di tengah masyarakat. Didid menekankan kepada entitas-entitas ilegal yang telah diblokir tersebut agar mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebtি dan menurunkan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelahnya, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjanga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebtি. Berikutnya, tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebtỉ selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappebtি, Bappebtি dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah Aldison.

Batasan:

Putugas Haji Meninggal saat Tugas, Menag Yaqut Serahkan

Aldison juga mengimbau kepada entitas ilegal di bidang PBK untuk mengajukan perizinan kepada Bappebtỉ serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kepada masyarakat, Bappebtỉ tidak akan lelah mengimbau agar lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK.

Aldison mendorong masyarakat selalu memastikan legalitas plialang berjanga yang menawarkan investasi dan jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat. "Sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi, perbaik terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Caranya mengakses website resmi Bappebtỉ di tautan https://ceklegalitas.bappebtি.go.id/," tandas Aldison. (*)